

KEGIATAN DPR-RI

MINGGU KEDUA SEPTEMBER 2012

Rangkuman berita kegiatan AKD DPR dalam edisi minggu kedua September 2012 ini, memuat berbagai kegiatan di bidang anggaran, pengawasan, dan dan kegiatan Ketua DPR.

Berikut ringkasannya:

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Rapat Paripurna pada tanggal 4 September memiliki agenda yaitu Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPR-RI terhadap RUU tentang APBN 2013 beserta Nota Keuangannya. Pada awal jawabannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa: sebagai instrumen kebijakan fiskal, RAPBN 2013 memiliki makna yang strategis, setidaknya pada dua aspek utama perekonomian nasional. pertama, RAPBN 2013 disusun sebagai upaya mendekatkan tercapainya sasaran-sasaran RPJMN 2010-2014. Kedua, RAPBN 2013 juga disiapkan untuk menjawab dan mengantisipasi tantangan serta isu-isu strategis perkembangan perekonomian global.

Visi RPJMN 2010-2014 untuk mewujudkan Indonesia yang makin sejahtera, demokratis dan berkeadilan, terus diupayakan pencapaiannya melalui penetapan berbagai target, sasaran-sasaran utama, serta prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah 2013, sebagai pelaksanaan tahun ke-4 dari RPJMN 2010-2014. Dengan mengusung tema “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”, RKP 2013 menekankan pentingnya penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian domestik untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Menteri Keuangan juga mengatakan penjabaran tema pembangunan, RKP 2013 tetap dalam koridor untuk menjalankan empat jalur strategis pembangunan, yaitu mendorong pertumbuhan (*pro-growth*), memperluas kesempatan kerja (*pro-job*), menanggulangi kemiskinan (*pro-poor*), serta merespon persoalan-persoalan perubahan iklim (*pro-environment*).

Atas pertanyaan beberapa fraksi DPR-RI mengenai target pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi global yang masih belum menentu, Menteri Keuangan mengatakan, Indonesia juga negara lainnya di dunia masih menghadapi ketidakpas-

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie



tian global yang tinggi karena belum adanya penyelesaian krisis di kawasan Eropa. Namun demikian Pemerintah masih yakin, Indonesia dapat bertahan dari dampak krisis global tersebut. Hingga saat ini, perekonomian nasional masih cukup kuat, dan bayang-bayang dampak krisis utang yang terjadi di AS dan Eropa, diharapkan tidak berdampak terlalu signifikan pada perekonomian nasional. Pemerintah tetap menyadari, sebagaimana saran fraksi, perlunya kewaspadaan terhadap dampak krisis tersebut dengan melakukan langkah-langkah mitigasi krisis, sehingga pengalaman buruk di tahun 1997-1998 diharapkan tidak terulang kembali.

Pemerintah menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% cukup realistis, mengingat masih solidnya permintaan domestik dan terjaganya stabilitas ekonomi makro secara cukup baik.

Terkait isu gejala *overheating*, pemerintah menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh dari gejala *overheating*. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi bersumber dari penguatan permintaan domestik, dapat dicapai dengan inflasi yang tetap rendah. Espektasi inflasi juga lebih baik, karena manajemen kebijakan makro yang membaik, yang diikuti dengan perbaikan pasokan dan distribusi bahan makanan.

Selanjutnya, menanggapi pandangan dari fraksi-fraksi lawan mengenai asumsi dasar ekonomi makro, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pemerintah cenderung bersikap *prudent* dan realistis namun tetap optimis dalam menetapkan asumsi dasar ekonomi makro. Pemerintah sependapat dengan Dewan bahwa stabilitas ekonomi makro perlu dijaga karena memiliki peranan yang penting terhadap kesejahteraan rakyat dan daya saing perekonomian nasional. Dalam kerangka tersebut, inflasi diupayakan dibawah 5% sejalan dengan *inflation targeting* Bank Indonesia. Nilai tukar akan dijaga pada level Rp. 9.300 per/US\$ dan tingkat suku bunga

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihasuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Rizka Arinindya; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra Sasmita **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

SPN 3 bulan diperkirakan pada level 5%. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai rata-rata US\$100/barel, *lifting* minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai 2.260 ribu barel/hari, setara minyak (BPH) meliputi *lifting* minyak 900 ribu bph dan *lifting* gas 1.360 ribu bph.

Sehubungan dengan pertanyaan fraksi mengenai pengelolaan BUMN dan peningkatan kontribusinya kepada penerimaan negara, pemerintah menjelaskan bahwa telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) pada BUMN. Penerbitan Peraturan Menteri BUMN tersebut dilakukan untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis yang sangat dinamis serta tuntutan masyarakat luas tentang penerapan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam Rapat Komisi V tanggal 3 September 2012 dengan menteri perhubungan dan lembaga-lembaga terkait, yang memiliki agenda **Evaluasi Penanganan Arus Mudik Lebaran Terpadu tahun 2012**, menyimpulkan bahwa: Komisi V menyatakan [1] keprihatinan dan penyesalan atas terjadinya peningkatan kasus kecelakaan selama periode penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu tahun 2012/1433 H, yang tercatat mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, khususnya kecelakaan sepeda motor yang mencapai 71% dari total kendaraan yang terlibat kecelakaan. Komisi V mendesak pemerintah untuk mengkaji keselamatan dan keamanan penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi jarak jauh (mudik). [2] mendesak Menteri Perhubungan selaku koordinator penyelenggaraan angkutan terpadu tingkat nasional agar mempersiapkan penyelenggaraan angkutan terpadu untuk tahun mendatang, dimulai dari selesainya Analisis Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2012/1433 H ini, dengan menyampaikan penyempurnaan rekomendasi kepada Komisi V.

[3] mendesak Pemerintah untuk bertindak lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum kepada semua pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan transportasi termasuk menindak para operator/penyedia dan pengguna jasa transportasi yang melakukan pelanggaran. [4] memberikan apresiasi kepada semua stakeholder dalam penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu 2012/1433 H, yang telah melakukan terobosan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kualitas pelayanan serta kapasitas layanan para pemudik. Komisi V selanjutnya pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada para petugas lapangan yang bekerja pada hari-hari libur nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

[5] sepakat dengan pemerintah untuk pemberian subsidi (PSO) angkutan khusus untuk sepeda motor dalam periode Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu pada tahun mendatang, dengan menggunakan moda pengangkutan kereta api, kapal laut dan angkutan darat.

Rapat Kerja/RDP Komisi III DPR-RI dengan Kapolri dan jajarannya pada 3 September 2012, menyimpulkan: Komisi III mendesak Kapolri [1] agar dalam menangani persoalan

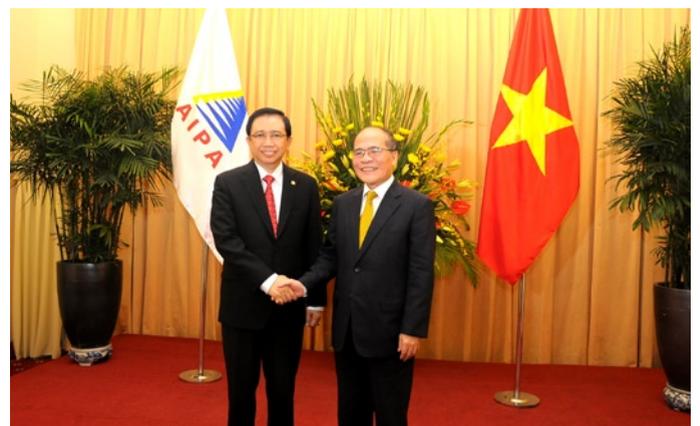
konflik horizontal dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat di berbagai daerah, bertindak lebih tegas, proporsional dan profesional dengan mengedepankan pendekatan humanis. [2] untuk memperhatikan perencanaan dan penataan pembangunan sarana dan prasarana keamanan Polri dengan menfokuskan pada tingkat Polsek dan Polres, dengan mempertimbangkan tempat, waktu dan potensi gangguan keamanan yang ada. [3] agar segera melakukan evaluasi internal terhadap institusi Polri dan secara intensif melakukan koordinasi dengan anggota Polri yang ditugaskan di institusi penegak hukum lainnya dengan tetap menjaga independensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dan memberikan *reward* dan *punishment* terhadap anggota Polri demi meningkatkan kinerja dan profesionalisme anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

ASEAN Visit

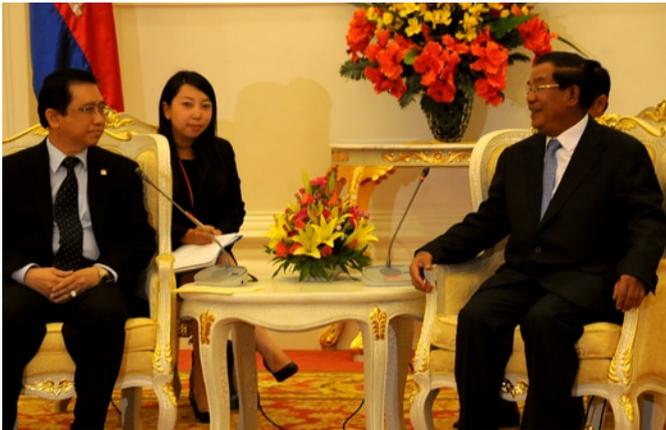
Ketua DPR selaku Presiden AIPA melakukan kunjungan kerja ke Vietnam, Thailand dan Kamboja untuk mematangkan agenda yang akan dibahas pada Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok, 16-23 September.

Di Vietnam, Ketua DPR-RI sebagai Presiden AIPA meminta Pemerintah Vietnam meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia, peningkatan hubungan sister city di antara kota kedua negara, termasuk peningkatan hubungan bilateral antarmasyarakat (*people to people contact*) antarkedua negara. Bisa melalui kerja sama sosial budaya, pariwisata, pertukaran pelajar dan beasiswa. Hal ini dikemukakan saat diterima Ketua Parlemen Vietnam, Nguyen Sinh Hung yang didampingi beberapa anggota Parlemen dan pejabat negara termasuk Menteri Luar Negeri Phan Binh Minh di Government Guest House, Hanoi, Rabu 5 September 2012.

Selain itu, Indonesia juga mengharapkan peran aktif Vietnam untuk menyelesaikan permasalahan Laut China Selatan. Sebagai *Country Coordinator ASEAN-China*, Vietnam harus lebih aktif mendorong diadakannya konsultasi dan negosiasi yang bersifat konstruktif, solutif, efektif dan strategis antara pihak yang terlibat langsung, dengan demikian, sengketa di Laut China Selatan dapat diselesaikan secara damai dan tidak ada penggunaan kekuatan militer. Ketua Parlemen Vietnam, Nguyen Sinh Hung mengapresiasi kunjungan Marzuki Alie



Presiden AIPA Marzuki Alie saat pertemuan dengan PM Kamboja Hun Sen di Hotel Sofitel, Phnom Penh, Kamboja, Jum'at 7 September 2012



Presiden AIPA Marzuki Alie mengungkapkan, permasalahan konflik di Laut China Selatan batal dibahas dalam sidang ke-33 AIPA yang akan digelar di Lombok, 16 hingga 22 September. Hal ini disampaikan sesuai pertemuan dengan PM Kamboja Hun Sen di Hotel Sofitel, Phnom Penh, Kamboja, Jumat 7 September 2012.

beserta delegasinya, dan berjanji akan mendorong meningkatnya hubungan bilateral antara Vietnam dan Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Sebab, menurutnya, total nilai perdagangan Indonesia-Vietnam pada tahun 2011 baru mencapai 4,7 miliar dolar AS dan belum mencerminkan potensi perdagangan kedua negara yang dapat mencapai 5 miliar dolar AS.

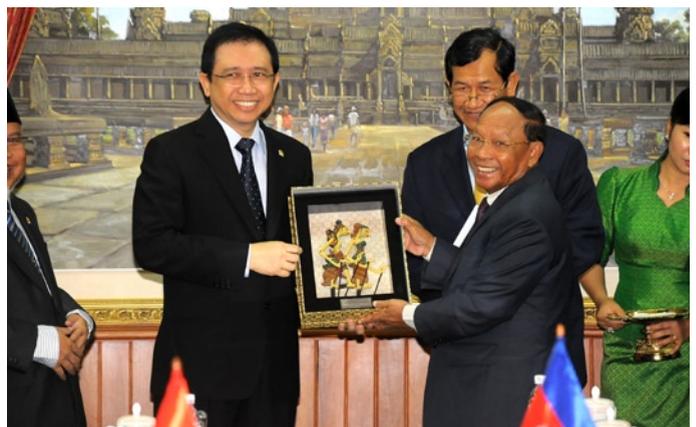
Selain dengan Ketua Parlemen, pertemuan Ketua DPR dengan Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam, H.E. Nguyen Tan Dung disampaikan, bahwa dalam kerangka hubungan yang lebih luas, Indonesia berkomitmen untuk memanfaatkan *Joint Commission for Bilateral Cooperation* untuk menggali peluang kerjasama, sekaligus mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam upaya kedua negara untuk mencapai apa yang telah kita gariskan bersama di dalam kerangka *Kemitraan Strategis*. Indonesia menyambut baik peningkatan signifikan di dalam hubungan dua arah kedua negara, sebagaimana digambarkan dengan peningkatan lebih dari 50 % volume perdagangan dari tahun 2010 ke 2011. Target perdagangan 5 Milyar dolar kedua negara untuk 2015 diyakini akan tercapai dan bahkan terlampaui.

Di Thailand, pertemuan Ketua DPR RI, Bapak DR. Marzuki Alie dengan Perdana Menteri Kerajaan Thailand, H.E. Yingluck Shinawatra, bertempat di Kantor Perdana Menteri Thailand, Bangkok – Thailand, pada hari Kamis, 6 September 2012, membahas berbagai isu bilateral, di antaranya kerjasama perdagangan beras, isu Laut China Selatan, kerjasama perikanan untuk pemberantasan illegal, unreported and unregulated fishing, dan rencana penyelenggaraan Sidang Umum AIPA ke -33 yang akan berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sementara, pertemuan Ketua DPR RI, Bapak DR. Marzuki Alie, dengan Ketua Parlemen Kerajaan Thailand, H.E. Somsak Kiatsuranont, bertempat di Gedung Parlemen Kerajaan Thailand (Sapha Phu Thae Ratsadon), Bangkok – Thailand, pada hari Kamis, 6 September 2012, membahas -di antaranya- agenda kegiatan Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, isu Laut China Selatan, pe-ningkatan kerjasama perdagangan beras dengan Thailand.

Terakhir, di **Kamboja**, Pertemuan Ketua DPR RI, Bapak DR. Marzuki Alie dengan Ketua Parlemen Kerajaan **Kamboja**, H.E. Heng Samrin, bertempat di Gedung Parlemen Kamboja, Phnom Penh - Kamboja, pada hari Jum'at 7 September 2012, membahas –di antaranya- agenda Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, isu sensitif Laut China Selatan yang tengah menghangat saat ini, kerjasama perdagangan beras yang telah ditandatangani pada bulan Agustus 2012 yang lalu antara Indonesia – Kamboja, dan peningkatan kerjasama investasi dan pembukaan jalur penerbangan langsung oleh maskapai Indonesia (Mandala dan Sriwijaya). Pertemuan Ketua DPR RI, Bapak DR. Marzuki Alie dengan Perdana Menteri Kerajaan Kamboja, H.E. Hun Sen, bertempat di Kantor Perdana Menteri Kerajaan Kamboja, Phnom Penh - Kamboja, pada hari Jum'at 7 September 2012, membahas -di antaranya- agenda Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, isu Laut China Selatan, kerjasama perdagangan beras sebagaimana yang tertuang di dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan dan Menteri Perdagangan Kamboja Cham Prasidh, kerjasama Indonesia – Kamboja dalam kerangka ASEAN melalui “The Second Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan”, dan kerjasama pembukaan jalur penerbangan langsung (*direct route*) antara Indonesia – Kamboja.**



Ketua DPR Marzuki Alie selaku Presiden Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA) memimpin Delegasi DPR ke Kerajaan Thailand 6 September 2012. Dengan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra, Presiden AIPA menyambut baik perkembangan hubungan bilateral kedua negara baik dalam ranah eksekutif maupun legislatif yang semakin meningkat.



Presiden AIPA Marzuki Alie saat menerima cinderamata dari Ketua Parlemen Kamboja Heng Samrin

DPR Sahkan Dua Peraturan Tata Cara Mempersiapkan Dan Penarikan RUU

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Selasa (11/9) secara aklamasi menyetujui dua peraturan yakni Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Tata Cara Penarikan RUU.

Kedua Peraturan DPR yang disahkan tersebut merupakan tindak lanjut disahkannya UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka DPR harus membentuk tiga Peraturan yaitu, Peraturan DPR tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas, Peraturan DPR tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU dan Peraturan DPR tentang Tata Cara Penarikan Kembali RUU.

Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sunardi Ayub, ke tiga peraturan tersebut sesuai perintah UU No. 12 Tahun 2011 harus sudah terbentuk setelah UU No.12 Tahun 2011 diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011.

Peraturan DPR tentang penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) telah disetujui Rapat Paripurna pada masa Persidangan Tahun 2011-2012 yang lalu. Sedangkan dua Peraturan berikutnya baru diselesaikan pada masa Persidangan ke empat Tahun Sidang 2011-2012.

Dijelaskan Sunardi Ayub, Peraturan tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU merupakan pengaturan mekanisme dan prosedur yang selama ini sudah dipraktekkan oleh DPR dalam mempersiapkan RUU dan menambah beberapa ketentuan baru yang sifatnya lebih detail terutama dalam mempersiapkan naskah akademis dan RUU.

Sedangkan Peraturan DPR tentang Penarikan RUU, Peraturan DPR ini merupakan tindak lanjut atau perintah Pasal 70 ayat 3 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dalam beberapa ketentuannya mengulang ketentuan yang telah tercantum dalam Peraturan Perundang-Undang lainnya dan menambah ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur yang selama ini telah dipraktekkan oleh DPR.

Rapat Paripurna DPR RI pagi itu,



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso saat memimpin Rapat Paripurna DPR membahas peraturan Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) dan Tata Cara Penarikan RUU



Sunardi Ayub saat memberikan laporannya kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dalam Rapat Paripurna membahas peraturan Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) dan Tata Cara Penarikan RUU

juga mengagendakan laporan BAKN DPR RI mengenai hasil telaahan BAKN Tahun 2012 dan Pengambilan Keputusan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan RUU tentang Perjan-

jian Internasional menjadi RUU DPR RI dan Pembentukan Pansus RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (mp/tt)/foto:iwan armanias/parle.

Bulog Diminta Jelaskan Tingginya Serapan Anggaran 2012

Anggota Komisi IV DPR RI Sukiman (F-PAN) meminta penjelasan Dirut Perum Bulog berkaitan tingginya serapan anggaran 2012 yang sudah mencapai 64,99%. Karena disinyalir Bulog lebih mengutamakan kebijakan impor daripada perhatian kepada petani.



Anggota komisi IV DPR RI Sukiman (kiri)

“Kami minta penjelasan terhadap prosentase ini, apakah lebih besar impor atau beras petani. Hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana format vosture anggaran 2013,” kata Sukiman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso di Ge-

dung DPR RI, Jakarta, Senin (10/9)

“Serapan beras dari rakyat menjadi perhatian Komisi IV, agar kita bisa memberikan payung hukum dan memberikan dorongan, sehingga petani-petani kita ini menjadi perhatian kita bersama tidak sekedar lips service atau sekedar bunga rampai dalam ber-

bahasa tetapi ini betul-betul menjadi sebuah kenyataan sehingga petani-petani kita bisa mempunyai harapan yang cukup baik”, papar Sukiman.

Saat RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, Sukiman juga mempertanyakan apakah serapan ini sudah termasuk impor beras dari Kamboja sebesar 100.000 ton dan bagaimana dengan impor beras dari India.

“Apakah kebijaksanaan ini juga termasuk didalam kebijakan anggaran 2013 dalam rangka pengadaan beras bahwa impor akan menjadi sasaran,” imbuhnya.

Sukiman berharap dalam kebijakan anggaran 2013 betul-betul menjadi perhatian bersama, sehingga 2014 swasembada beras akan tercapai.

Dirut Bulog Sutarto Alimoeso dalam paparannya kepada Komisi IV menyatakan bahwa realisasi anggaran sampai dengan 6 September 2012 sebesar Rp 18,929 triliun atau sebesar 64,99% dari total anggaran 2012 sebesar Rp 19,378 triliun. (sc),foto:wahyu/parle



Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso beserta jajarannya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI

Gede Pasek Suardika: Komisi III Tidak Mengadili Pansel Calon Anggota Komnas HAM

Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika menekankan pemanggilan mantan anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komnas HAM 2012-2017 tidak dalam konteks mengadili tetapi meminta keterangan dan konfirmasi terhadap beberapa laporan yang telah disampaikan masyarakat.

“Bukan ingin mengadili Pansel, tapi ingin menyamakan posisi karena sebelumnya ada laporan *Ombudsman*, ada pengaduan masyarakat, nah sekarang kita dengarkan penjelasan Pansel. Kita tidak ingin seleksi anggota Komnas HAM menghasilkan putusan yang melanggar HAM,” ujarnya dalam RDPU dengan Pansel di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9/12).

Sebelumnya Ketua Pansel Jimly Asididqie menyampaikan aspirasi anggota pansel lain yang merasa seperti akan diadili DPR. “Ada kesan kita mau diadili Komisi III,” ungkapnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini memaparkan pansel yang dipimpinnya sudah bekerja secara independen dan seluruh proses seleksi telah mendapat persetujuan rapat pleno Komnas HAM.

Ia menambahkan untuk pertama kali jumlah pendaftar mencapai angka 370 orang. Semua disaring dalam proses yang transparan mulai dari seleksi administrasi, kesehatan, psikotes, penulisan makalah dan wawancara. Dalam proses wawancara pansel juga



Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika saat memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pansel

melibatkan para mantan anggota Komnas HAM.

Terkait penilaian *Ombudsman* yang menyebut telah terjadi mal-administrasi dalam proses seleksi pakar hukum tata negara ini berpendapat hal itu lebih baik diuji di Mahkamah Konstitusi.

“Mekanisme negara boleh saja dicoba, sampaikan pengaduan kepada MK. Kalau ternyata majelis hakim mengatakan ini harus diulang ya kita ulang

saja,” tandasnya.

Namun Guru Besar FHUI ini menekankan proses bernegara tidak boleh berhenti. “Tidak boleh proses bernegara berhenti apabila ada protes dari warga negara,”ujarnya.

Anggota Komisi III dari FPPP Ahmad Yani mengatakan penjelasan dari pansel dapat diterima. Ia berpendapat walaupun ada kekurangan, proses pemilihan calon anggota Komnas HAM dapat dilanjutkan ketahap fit and proper test. “Pandangan saya proses ini kita teruskan, walaupun sekarang ada yang menggugat ke pengadilan, itu tidak terkait karena memperlakukan gaji. Jadi kita bisa teruskan ke tahap fit and proper test,” tandasnya.

Pendapat senada disampaikan Ruhut Sitompul dari FPD. “Saya sependapat, kita lanjut ke proses fit and proper test,”paparnya.

Sementara terkait usulan beberapa pihak yang meminta penambahan anggota Komnas HAM, ia tidak sependapat. Baginya yang penting komisi dapat menunjukkan kualitas kerja bukan kuantitas. (iky), foto : wahyu/parle.



Ketua Pansel Jimly Asididqie (tengah) saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR

Kementerian PAN-RB Usulkan Tambahan Anggaran 2013

Terkait usulan tambahan pagu anggaran tahun 2013 yang diajukan Kementerian PAN-RB, Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, Komisi II DPR akan menugaskan Badan Anggaran Komisi II untuk menindaklanjutinya dalam pembahasan selanjutnya di Badan Anggaran DPR.



Wakil Ketua komisi II DPR RI Ganjar Pranowo



Suasana rapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Gedung DPR RI

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan kegiatan new inisiatif, dengan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp. 179.4 Miliar

“Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.229/KMK.02/2012 tang-

gal 16 Juli 2012 tentang Pagu Anggaran Kementerian PAN-RB TA.2013, Kementerian PAN-RB memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp.201 Miliar,”kata Sekretaris Utama (Sestama) Kementerian PAN-RB Tasdik Kinanto dalam rapat dengan Komisi II, di Jakarta, Senin (10/9).

Untuk itu, usulan untuk penambahan anggaran tersebut, jelas Tasdik, diajukan untuk memenuhi kekurangan anggaran di Kementerian PAN dan RB untuk program pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar Rp 24 Miliar. Tambahan kekurangan pembayaran tunjangan kinerja selama 13 bulan sebesar Rp 7.4 Miliar. “Tambahan kekurangan pembayaran tunjangan kinerja ini telah kami usulkan pada raker tanggal 5 Juni 2012 dan RDP tanggal 23 Juni 2012 dan telah disepakati dalam kesimpulan,” ujarnya.

Selanjutnya, tambah tasdik, tambahan pagu anggaran dalam rangka penyelesaian tenaga honorer katagori II yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 sebesar Rp. 148 Miliar. “Hal ini sebelumnya sudah disepakati dalam RDP tanggal 23 Juni 2012 dan telah disepakati dalam kesimpulan,”terangnya.

Dengan adanya usulan tambahan anggaran tersebut, kata Tasdik, keseluruhan anggaran Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi akan menjadi Rp. 380 Miliar.

Sementara itu, dalam kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, terhadap usulan tambahan pagu anggaran tahun 2013 yang diajukan Kementerian PAN-RB, Komisi II DPR akan menugaskan kepada Badan Anggaran Komisi II untuk menindaklanjutinya dalam pembahasan selanjutnya di Badan Anggaran DPR.

Selain Kementerian PAN-RB, kesimpulan lainnya, Komisi II DPR juga akan membahas usulan tambahan pagu anggaran yang diajukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebesar Rp. 40 Miliar, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Rp. 158 Miliar, dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebesar Rp. 1.2 Miliar.(nt) foto:wy/parle

DPR Siapkan Raker Gabungan dengan Menkopolhukam Bahas Isu Terorisme

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyampaikan keprihatinan atas terjadinya aksi teror di Solo, Jateng yang berlanjut dengan temuan bahan peledak di Tambora, Jakbar serta di Depok, Jawa Barat.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat penutupan Pimpinan Komisi III DPR RI

“Kita dikagetkan dengan temuan ini, saya tidak tahu apakah bahasanya alat negara kecolongan, tapi nyatanya terjadi semua itu. Komisi III dan I yang terkait isu ini patut melakukan evaluasi kinerja aparat dilapangan,” kata Priyo saat memimpin rapat koordinasi di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/12).

Baginya setelah dilakukan pengkajian, DPR berada dalam dua pilihan menarik kembali anggaran yang telah disetujui apabila terbukti aparat tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau menambah anggaran apabila memang dibutuhkan.

Dia sepakat proses evaluasi itu dilakukan dalam rapat kerja gabungan Komisi III dan I dengan

Menkopolhukam dan jajaran menteri terkait.

“Saya setuju rapat gabungan dengan Menkopolhukam dan jajaran menterinya. Masukan yang sama dari Komisi I juga sudah saya terima. Tolong antara staf segera berkoordinasi untuk menentukan jadwal, tapi saya harapkan bisa berlangsung pertengahan bulan ini,” lanjut Priyo.

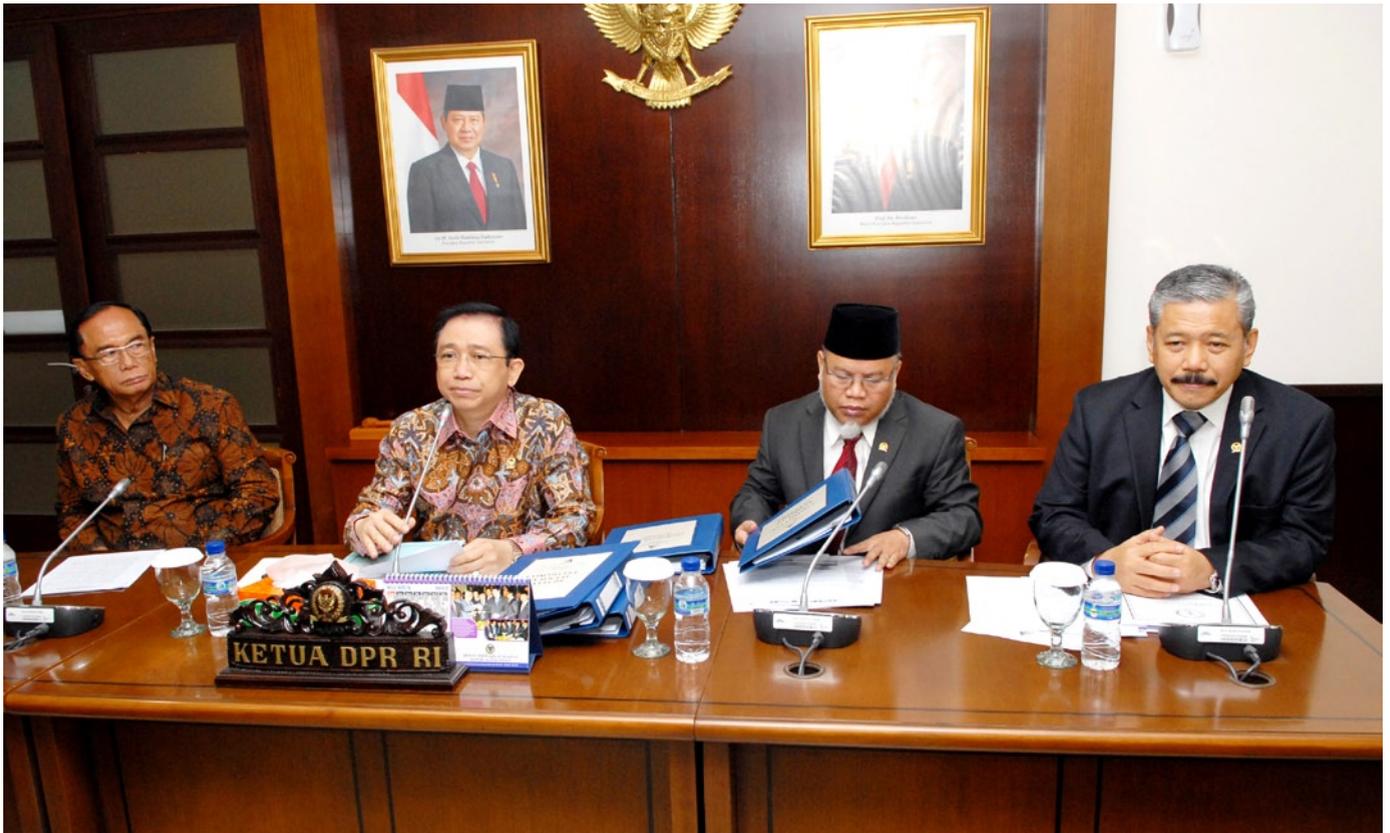
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsudin juga menekankan dalam rapat gabungan tersebut patut dikajidugaan lemahnya kinerja intelijen mengantisipasi aksi terorisme yang terjadi belakangan ini. “Kami khawatir intelijen kita di BIN, TNI dan Polri tidak sinergi, itulah alasan agenda rapat dengan menkopolhukam penting,” tandasnya.

Ia juga mengingatkan dalam pidato Presiden SBY beberapa waktu lalu disebutkan penegakan hukum merupakan agenda utama. Namun kenyataannya hal itu tidak tampak dalam siklus RAPBN 2013 yang telah disampaikan kepada DPR. Permasalahan ini menurutnya perlu dipertanyakan kepada pemerintah.

Usai rapat Priyo selaku Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menetapkan jajaran pimpinan Komisi III yang memasuki masa persidangan Tahun Sidang 2012-2013 tidak mengalami perubahan. Ketua, Gede Pasek Suardika (FPD) dengan 3 Wakil Ketua, Aziz Syamsudin (FPG), Tjatur Sapto Edy (FPAN) dan Nasir Djamil (FPKS). (iky)/foto:eka hindra/parle.

Komite Politik AIPA Bahas Konflik Laut China Selatan

Salah satu agenda penting dalam persidangan Komite Politik Sidang Umum ke-33 AIPA (Asean Inter-parliamentary Assembly) di Lombok, NTB 16-23 September yang akan datang adalah konflik Laut China Selatan.



Konferensi pers Ketua DPR RI Marzuki Alie (dua dari kiri) membahas konflik laut China Selatan

Empat negara Asean yaitu Malaysia, Filipina, Brunai Darussalam, Vietnam saling klaim dengan Taiwan dan China beberapa pulau di kawasan itu.

“Konflik Laut China Selatan akan dibicarakan dalam Komite Politik. Pembicaraan tidak akan melenceng dari semangat kebersamaan Asean, AIPA dan kebersamaan mitra Asean. Intinya adalah kita ingin mendorong masalah kawasan dilakukan secara damai, tidak dengan mengedepankan kekerasan, senjata dan sebagainya,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam konferensi pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/9/12).

Forum parlemen tambahannya adalah forum dialog dan hasil dialog itu akan

menjadi resolusi yang harus disepakati bersama. Apabila satu negara saja tidak sepakat maka dapat dipastikan resolusi tidak akan menjadi ketetapan. Organisasi parlemen negara anggota Asean ini juga menyepakati tidak akan menggunakan mekanisme voting dalam mengambil putusan.

Marzuki mengungkapkan dalam kunjungan kerja ke Kamboja selaku Presiden AIPA beberapa waktu lalu telah berbicara dengan Presiden Hun Sen. Dalam pertemuan tersebut terungkap harapan dari Hun Sen yang saat ini menjabat Ketua Asean agar masalah Laut China Selatan tidak dibahas dalam Sidang Umum AIPA. “Dia minta di forum AIPA agenda Laut China Selatan itu jangan dibahas dulu,

lebih baik fokus pada persoalan menuju Asean Community 2015,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan isu Laut China Selatan telah ditetapkan menjadi agenda Sidang Umum AIPA dalam Executive Committee Meeting di Yogyakarta, awal Juli lalu. Persoalan saling klaim beberapa pulau kecil di kawasan strategis ini menjadi perhatian dunia terutama setelah angkatan bersenjata negara yang bertikai mulai melakukan manuver.

Sebagai catatan tambahan, pertemuan para Menteri Luar Negeri Asean di Kamboja beberapa waktu lalu juga gagal mencapai kata sepakat (Joint Communiqué) terhadap isu sensitif ini. (iky) foto:wy/parle

Komisi X DPR RI Tinjau Pembukaan PON XVIII 2012 di Riau

Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Asman Abnur (F-PAN) meninjau pembukaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 di Stadion Utama Pekanbaru, Riau yang dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa Malam (11/9)

“Selain menghadiri pembukaan PON, Tim Komisi X juga akan melakukan peninjauan langsung ke beberapa pertandingan cabang olahraga seperti Menembak, Bowling, Billiar, Softball, Baseball, Gulat dan Futsal”, ujar Asman.

Anggota Komisi X yang ikut menghadiri pembukaan PON XVIII antara lain Rinto Subekti, Hartanto Edhie Wibowo, Anton Sukartono Suratto, Harbiah Salahuddin, Zulfadli, TB. Dedi Suwandi Gumelar, Ahmad Zainuddin, Eko Hendro Purnomo, Reni Marlinawati, Abdul Hamid Wahid, Nurodji dan Djamal Aziz.

Upacara Pembukaan PON XVIII Tahun 2012 dilaksanakan di Stadion Utama yang terletak di kawasan olahraga Universitas Riau di Pekanbaru. PON XVIII Tahun 2012 akan dilaksanakan selama duabelas hari, dimulai pada Minggu 9 September 2012. Upacara penutupan akan dilakukan pada Kamis 20 September 2012.



Komisi X DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Asman Abnur meninjau pembukaan PON XVIII di Stadion Utama Pekanbaru, Riau

1.100 siswa Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Riau akan turut ambil bagian di Pembukaan PON XVIII di Riau. Ribuan siswa ini akan menampilkan senam dan tarian khas Riau.

39 cabang olahraga akan dipertandingkan di PON XVIII Tahun 2012 Riau, dengan 555 nomor pertandingan.

Medali yang akan diperebutkan sebanyak 555 medali emas, 729 medali perak dan 729 medali perunggu.

PON XVIII Tahun 2012 di Riau akan diikuti oleh kurang lebih 11.276 atlet dari 33 provinsi di Indonesia. (sc), foto : riaukita.com.

Komisi X DPR RI Kritik Panitia PON XVIII Riau

Tim Komisi X DPR RI mengkritik kinerja panitia penyelenggara PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau, terutama dalam hal pembangunan venue dan fasilitas pertandingan.

“Dari hasil peninjauan ke beberapa venue, kami menilai venue PonXVIII tidak layak dan terkesan dipaksakan untuk digunakan,” kata Ketua Tim Komisi X Zulfadli (F-PG) di saat mengunjungi venue biliar dan bowling di Riau, Rabu (12/9).

Tim Komisi X sangat kecewa, venue biliar yang digunakan di PON Riau ini ternyata jauh dari standar, terkesan dipaksakan untuk digunakan, dan tribun untuk penonton tidak tersedia.

“Dari apa yang kami lihat, venue biliar tidak layak. Ada ruang tersisa dari arena bowling, lalu dipakai untuk biliar,” ungkapnya.

Kualitas pembangunan sejumlah venue di PON XVIII Riau memang patut dipertanyakan. Sejumlah kerusakan diberbagai venue terus terjadi, meski pesta olahraga tersebut sudah memasuki hari kedua.

Selain menyoroti venue pertandingan, Tim Komisi X juga me-

nyoroti soal wisma atlet PON yang dinilai tidak layak.

“Tadi kami mendengar keluhan dari official dan atlet mengenai kondisi wisma atlet. Ada yang tidak mandi selama dua hari, termasuk makanan,” kata Zulfadli.

Akibat kondisi wisma atlet yang kurang layak, banyak official yang memindahkan para atletnya ke hotel-hotel atau menyewa rumah penduduk. (sc)

Tujuh Ketua Parlemen Hadiri Sidang Umum AIPA

Tujuh Ketua Parlemen dari Negara Anggota *Asean Inter Parliamentary Assembly* (AIPA) dipastikan akan menghadiri Sidang Umum AIPA Ke-33 yang akan diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, tanggal 16 – 22 September mendatang.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Surahman Hidayat usai mendampingi Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam jumpa Pers di gedung DPR, (Selasa 11/9).

Surahman mengatakan, hingga 10 September 2012 tercatat 347 peserta Sidang Umum ke-33 AIPA dari 10 negara anggota AIPA (termasuk Indonesia) dan 9 (sembilan) Parlemen Negara Observer serta 6 (enam) tamu tuan rumah (Guest of the Host) akan hadir.

Dari 10 Parlemen Observer, 9 diantaranya yakni Australia, Belarus, Kanada, China, Parlemen Eropa, India, Jepang, Republik Korea dan Federasi Rusia telah mengkonfirmasi hadir.

Dalam sidang umum ini, juga mengundang sejumlah tamu termasuk

dari *Inter-Parliamentary Union* (IPU) yakni organisasi parlemen dunia, dan juga Parlemen Timor Leste, yang dipimpin langsung Ketua Parlemennya, serta *Asean Supreme Audit Institution* dan *Asean-WEN*.

Sidang Umum AIPA kali ini akan mengusung tema besar yakni “Strengthening the Parliamentary Roles towards ASEAN Community 2015”. Tema ini, katanya, diambil mengingat DPR memiliki perhatian mendalam mengenai peran dan apa yang bisa parlemen lakukan dalam mewujudkan komitmen regional pembentukan Komunitas Asean 2015.

Surahman mengatakan, forum AIPA dipandang tepat untuk mendiskusikan peran keparlemenan seperti apa yang bisa dilakukan oleh para anggota par-

lemen dan parlemen dari Negara Asean terhadap perkembangan berbagai isu yang ada di Asean.

Pada Sidang Umum ke-33 nanti, beberapa agenda yang telah ditetapkan akan terbagi ke dalam enam sesi, yakni Komite Politik, Komite Ekonomi, Komite Sosial, Komite Organisasi, Dialog dengan Observer dan juga Women AIPA.

Di Bidang politik isu yang akan dibahas adalah mengenai upaya untuk meningkatkan kesadaran publik terkait Asean Community dan isu Laut China Selatan.

Di Bidang Ekonomi, pembahasan berfokus pada kesadaran publik terhadap upaya penanggulangan bencana dan juga mengenai *Low Carbon*.

Beberapa isu lainnya seperti peningkatan SDM, dan kerjasama multilateral dalam isu Laut China Selatan dibahas bersama dalam dialog dengan Parlemen Negara Observer.

Terkait WAIPA, isu-isu spesifik mengenai perempuan seperti pemberdayaan perempuan di perdesaan akan didiskusikan secara mendalam dalam forum ini.

Surahman menambahkan, dalam Sidang Umum ini, DPR menawarkan kerja-kerja konkret dalam resolusi-resolusi AIPA tahun ini. Kerja konkret itu tentunya untuk mendukung terwujudnya mimpi Komunitas Asean 2015.

Misalnya di bidang UKM, kita perlu menggapai dukungan politik untuk pembiayaan bagi UKM di level regional, di bidang Green Economy perlu untuk mewujudkan sistem ekonomi yang riil memperhatikan lingkungan dan mendukung konsep tersebut melalui legislasi-legislasi yang *pro-green economy*.

DPR mengharapkan agar isu elitisme Asean dapat ditepis dengan mendorong pemerintah mewujudkan kebijakan-kebijakan Asean yang *people-centered*. (tt), foto : riska/parle.



Konferensi pers Ketua DPR RI Marzuki Alie (tengah) terkait penyelenggaraan AIPA di Lombok, NTB.

Komisi VII DPR Setujui RUU Keantariksaan Segera Dibahas

Komisi VII DPR menyetujui RUU Keantariksaan segera dibahas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di DPR. Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR membahas RUU Keantariksaan di Gedung Nusantara I, Kamis, (13/9).

“Fraksi Partai Hanura memandang keantariksaan Indonesia memerlukan suatu landasan hukum yang kuat dimana harus memuat pengaturan terkini dengan mempertahankan perkembangan kemajuan teknologi dimasa mendatang, oleh karenanya RUU Keantariksaan merupakan RUU yang sangat dibutuhkan bagi sektor keantariksaan di Indonesia,” kata M. Ali Kastella dari Fraksi Hanura saat menyampaikan pandangan Fraksinya.

Dia mengatakan, kegiatan keantariksaan harus diatur dalam UU agar dapat mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia, mengoptimalkan penyelenggaraan keantariksaan, menjamin keberlanjutan penyelenggaraan keantariksaan, memberikan landasan dan kepastian hukum, mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan keantariksaan, melindungi negara dan warga negaranya dari dampak negatif keantariksaan dan mengoptimalkan penerapan perjanjian penyelenggaraan keantariksaan yang telah diratifikasi.

Menurut Kastella, pengaturan keantariksaan melalui RUU di Indonesia bermaksud untuk menghindari kerugian dan kecelakaan akibat kegiatan keantariksaan oleh pemerintah, organisasi, asing, swasta, dan entitas non-pemerintah yang mengatasnamakan negara Indonesia, mendorong penguasaan sains dan teknologi keantariksaan yang sistematis serta memperjelas posisi regulator, operator, dan para pihak yang terlibat kegiatan keantariksaan serta peraturan pelaksanaannya.

“Kehadiran RUU keantariksaan untuk mencapai kemandirian dibidang teknologi keantariksaan, dan penataan kelembagaan keantariksaan dalam menunjang tujuan nasional, yang tu-



M. Ali Kastella (kiri) dari Fraksi Hanura saat menyampaikan laporan pandangan Fraksinya mengenai RUU Keantariksaan di Gedung DPR RI



Gedung Lapan di Jakarta

juan akhirnya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara terutama kesejahteraan masyarakat di daerah,”ujarnya.

Fraksi Partai Hanura, lanjutnya, melihat ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa sangat besar kontribusinya

dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya, baik dari perspektif keamanan maupun kesejahteraan. “Oleh karena itu, perlu ada panduan dalam bentuk pengaturan yang komprehensif,”paparnya (si)foto:wy/parle

Kunker Baleg DPR Ke Denmark Bukan Jalan-Jalan

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Bukhori Yusuf (F-PKS) mengatakan, kunjungan kerja anggota Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Palang Merah ke luar negeri (Denmark) tidak semata-mata untuk menghibur diri atau jalan-jalan.



Anggota Badan Legislasi DPR Bukhori Yusuf saat diwawancarai oleh wartawan di Gedung DPR RI

“Jadi tidak semata-mata untuk menghibur diri dan jalan-jalan, tidak betul kalau DPR jalan-jalan ke luar negeri,” tegasnya.

Menurutnya, DPR melakukan kunjungan kerja karena memang ada isu penting yang akan dibahas. “Kalau tidak ada kunjungan ini bisa dipastikan RUU tentang Palang Merah ini berhenti karena perdebatannya memang sangat alot bahkan sampai saat ini,” tuturnya kepada Parlemen, di Gedung DPR, Selasa (11/9).

Dia menambahkan, Panja RUU tentang Palang Merah disana melakukan kegiatan seperti pertemuan dengan pihak palang merah itu sendiri, pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri, dan pertemuan dengan Parlemen Denmark yang terkait dengan masalah pembentukan undang-undang.

Jadi yang benar, menurutnya, ketika kita keluar dari Kementerian Luar

Negeri disana itu bertepatan dengan jam pulang kantor, lalu kita juga punya jadwal waktu pertemuan dengan Duta Besar (Dubes Indonesia) yang ada disana.

Dia menegaskan, hasil dari pertemuan Panja RUU Palang Merah dengan Dubes ternyata mendapatkan masukan yang sangat banyak dan berharga, bukan hanya terkait dengan masalah Palang Merah atau Kepalangmerahan tetapi banyak kepentingan negara. Misalnya, kerjasama dengan universitas. “Dubes kita sangat welcome dalam konteks ini dan mendorong kepada kita, jadi pertemuan kita dengan Dubes sangat penting,”ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintah atau negara itu tidak mengatur secara khusus terhadap Palang Merah. Dia adalah merupakan lembaga NGO yang sama dengan NGO-NGO yang lain, tidak ada bedanya.

Bukhori mengatakan, sumbangsih negara kepada Palang Merah dalam anggaran tidak lebih dari 5 persen dari anggaran NGO Palang Merah. Sinyanya mereka dapatkan dari kegiatan masyarakat dan sumbangan dana dari masyarakat.

Saat ditanya apakah penting simbol itu sampai diperdebatkan sedemikian rupa, Bukhori mempersilahkan kepada rekan media untuk mencari tahu mengenai apa pentingnya simbol Palang Merah.

Menurutnya, tujuan kita ke kanal bukan dalam rangka sengaja di jadwalkan, tetapi dalam rangka fungsi kedewanan, kita juga memiliki fungsi untuk representasi. “Kalau kita mau membangun negara seperti apa sih, kalau kita mau mengelola kanal seperti apa sih, kalau kita mau mengelola kapal seperti apa sih, apalagi negara kita negara maritim makanya ini sangat penting buat saya. Padahal kalau kita naik perahu terbuka itu harganya sangat murah hanya 40 Krone (Rp 60 ribu), dengan harga Rp 60 ribu kalau di Indonesia hanya dapat 2 mangkok bakso,” katanya.

Jadi, lanjutnya, tidak ada persoalan-persoalan yang melanggar terhadap aturan-aturan kita dan secara etik juga tidak ada. Karena manfaat yang kita dapatkan di kanal itu jauh lebih besar dari 40 Krone (Rp 60 ribu). “Kok negara sekecil itu mampu mengelola kotanya yang didalamnya ada kanal, itu ‘kan luar biasa yang menjadi sumber devisa negara,’” katanya.

Dia menambahkan, Indonesia memiliki sungai Ciliwung, sungai Musi, sungai Berantas kenapa tidak dikelola seperti itu. “Kalau kita menjadi pemimpin harus punya gambaran besar, jangan menjadi kota dalam tempurung,” jelasnya.(iw)/foto:iwan armanias/parle.

BPN Usulkan Tambahan Anggaran 2013

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp. 357 Miliar kepada Komisi II DPR, untuk sejumlah kegiatan baru atau new inisiatif.

Dalam RAPBN 2013, BPN mendapat alokasi pagu anggaran sementara sebesar Rp. 4.1 Triliun, total pagu anggaran tersebut naik sebesar 2,8 persen dari total pagu indikatif dan naik sebesar 5,4 persen dari pagu definitif tahun 2012 lalu.

Tambahan tersebut diajukan Kepala BPN Hendarman Supandji Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Jakarta, Senin (10/9), dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebijakan dan kebutuhan-kebutuhan baru dibidang pertanahan yang belum teralokasikan anggarannya pada pagu sementara RKAKL BPN-RI tahun 2013.

Kegiatan baru yang diusulkan tahun 2013, kata Kepala BPN adalah pengembangan peralatan dan fasilitas perkantoran, gedung/bangunan sekolah tinggi pertanahan nasional sebesar Rp. 1.4 Miliar, Pemetaan Sosial Ekonomi Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rp. 19 Miliar, Pemetaan Tematik Tanah Ulayat Rp. 5.9 Miliar, Penelitian Pengelolaan Tanah Ulayat di Papua dan Papua Barat Rp. 3.3 Miliar, Penyusunan Paper Kebijakan Pengelolaan Tanah Ulayat di Papua dan Papua Barat Rp. 606 juta, Pembangunan Data Base Pertanahan Rp. 300 Miliar.

Sementara, pembuatan Peta Dasar Pertanahan Skala 1:2.500 sebesar Rp. 1.1 Miliar, Evaluasi dan Penilaian Terhadap Pelaksanaan kegiatan Pensertipikatan tanah lintas sektoral Rp. 1.5 Miliar, Workshop Pengandaan Tanah Rp. 313 juta, Penyelesaian konflik pertanahan Rp. 18 Miliar, Program pemberdayaan Masyarakat pasca Legalisasi asset prona Rp. 4.8 Miliar, dan Sertifikat barang milik negara berupa tanah pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp.1 Miliar.

Menanggapi usulan tambahan

pagu anggaran tahun 2013, dalam kesimpulannya, Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan Komisi II meminta kepada BPN untuk segera menyampaikan usulan kegiatan dan anggaran secara lebih rinci, sekaligus meminta BPN untuk menindaklanjuti beberapa hal. Diantaranya melaksanakan Reforma Agraria dengan tahapan-tahapan yang runtut dan terukur tingkat pencapaiannya, melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan konsisten dalam meningkatkan kinerja lembaga.

Selanjutnya, membuat arah kebi-

jakan yang jelas terkait penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan secara komprehensif, menetapkan biaya secara pasti untuk pelaksanaan Prona yang sekaligus menjamin tidak akan ada lagi biaya tidak sah diluar biaya yang telah ditetapkan.

Selain itu, melakukan evaluasi terhadap efektifitas Program Larasita, dan segera menindaklanjuti masalah-masalah yang menjadi temuan dari hasil audit BPK serta teguran dari KPK dan Ombudsman RI. (nt), foto : wahyu/parle.



Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja



Kepala BPN Hendarman Supandji beserta jajarannya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR

Timwas Century Bertanyakan Pertemuan 9 Oktober

Mayoritas Anggota Tim Pengawas Century mempertanyakan statement Mantan Ketua KPK Antasari Azhar bahwa ada rapat yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 9 Oktober 2008 lalu yang diduga membicarakan persoalan bailout Bank Century.

“Kita meminta langsung dibukanya rekaman rapat di Istana pada 9 Oktober 2008 lalu,” tegas Bambang Soesatyo (F-PG) saat RDPU Timwas Century dengan Antasari Azhar, membahas persoalan bail out Century, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Gedung DPR, Rabu, (12/9).

Sementara sebelum Rapat berlangsung, Achsanul Qosasih (F-PD) mengatakan, statement Antasari ini cukup menghentak publik pasalnya, pernyataannya tidak pernah muncul menjadi fakta saat Rapat Pansus. “Kita akan menguji kebenaran pernyataan Antasari dan meminta penegasan informasi lainnya,”ujarnya.

Menurutnya, pernyataan Antasari akan menjadi dokumen negara dan kita harapkan dapat digali lebih mendalam. “Ini aneh sekali Antasari berbicara bail out karena pengambilan keputusan itu berada di Forum Stabilitas Sektor Keuangan (FSSK), selain



Anggota Tim Pengawas Century Achsanul Qosasih (F-PD)

itu beliau berbicara disitu dari sisi konteks hukumnya terkait perkembangan ekonomi global, bukan berbicara me-

ngenai bail out,”paparnya.

Rapat memanggil Antasari ini sebelumnya beredar ramai soal pengakuan Antasari tentang adanya rapat di Istana pada 9 Oktober 2008 soal bailout Century. Namun didalam keterangannya Antasari dihadapan DPR membantah dan menegaskan bahwa rapat itu membahas dan menghadapi krisis terkait perekonomian global.

Timwas Century akhirnya menyepakati usulan agar rekaman rapat di Kantor Presiden pada 9 Oktober 2008 lalu segera diputar. Seluruh anggota Timwas yang mewakili fraksinya menyetujui usulan itu.

Pimpinan rapat Timwas, Pramono Anung kemudian meminta persetujuan seluruh perwakilan fraksi yang hadir sebagai anggota Timwas. Seluruh fraksi yang hadir yaitu, FPD, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, dan Hanura setuju dengan usulan itu. Setelah disetujui, permintaan rekaman akan diajukan ke institusi terkait. (si)foto:wy/parle



Mantan Ketua KPK Antasari Azhar

Revisi UU Advokat Dorong Terciptanya Sistem Hukum Terintegrasi

Komisi III DPR akan memperjuangkan revisi UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan menempatkan kembali posisi advokat sebagai profesi yang terhormat.

“Cara memandang kita terhadap UU Advokat harus clear juga. Jangan sampai kita memandang advokat itu adalah sesuatu yang kotor karena dia berada di tempat dimana seseorang posisinya sebagai tersangka/terdakwa. Sementara jaksa itu adalah bersih karena dia menuntut mewakili negara di dalam penegakan hukum, ini tidak boleh begitu juga,” ujarnya Ketua Komisi III DPR Gede Pasek kepada parlemen, di Gedung DPR, Selasa, (11/9).

Menurut Pasek, banyak juga oknum jaksa yang tidak benar dan banyak juga advokat yang tidak benar, kedua pilar baik jaksa dan advokat diperlukan dalam menciptakan *integrated justice system*. “Karena pengadilan itu seimbang, bandulnya itu berada di tengah-tengah,” paparnya.

Menurutnya, cara berpikirnya seorang advokat memang oleh UU ditakdirkan harus berdiri diposisi tersangka/terdakwa dan terpidana yang mungkin minta Peninjauan Kembali (PK). “Jadi posisi dia itu ada disitu oleh undang-



Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika saat diwawancarai oleh wartawan

undang,” kata Gede Pasek.

Sementara, lanjutnya, jaksa penuntut umum memang diposisikan sebagai orang yang mendakwa, kalau

menyangkakan itu polisi, dan hakim posisi untuk memvonis. “Ini ‘kan masalah *position integrated justice system*-nya seperti itu,” jelasnya. Jadi, lanjutnya, jangan sampai orang yang berada di tempat tersangka/terdakwa ini disamakan, itu tidak boleh, Undang-Undang Advokatnya tidak memperbolehkan hal itu.

Pasek mencontohkan, banyak orang tidak korupsi namun didakwa korupsi, jadi siapa yang membela dirinya. Selain itu, banyak orang yang tidak terlibat narkoba karena dia terjebak kemudian disidangkan, “Advokatlah yang tugasnya membela,” ujarnya.

Karena itulah, lanjutnya, advokat itu memang memiliki posisi jabatan yang terhormat. “Yang jahat adalah advokat kalau jadi makelar kasus. Artinya ketika dia membela kasus korupsi dia memberitahu kepada koruptor caranya melarikan uang, supaya uangnya tidak diambil oleh negara. Itu advokat yang salah,” tuturnya. (iw)/foto: iwan armanias/parle.



Kongres Advokat di Jakarta

Komisi V Desak Pemerintah kaji Sepeda Motor Sebagai Transportasi Jarak Jauh

Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengkaji keselamatan dan keamanan penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi jarak jauh (mudik).

Komisi V DPR RI memprihatinkan terjadinya peningkatan kasus kecelakaan selama periode penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2012/1433 H yang tercatat mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, khususnya kecelakaan sepeda motor yang mencapai 71% dari total kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Demikian salah satu kesimpulan rapat yang disampaikan Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow saat rapat kerja dengan Menteri Perhubungan dan jajarannya serta mitra kerja lainnya yang menangani arus mudik Lebaran, Senin (3/9) di gedung DPR.

Komisi V DPR RI juga mendesak kepada Menteri Perhubungan selaku Koordinator Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tingkat Nasional agar mempersiapkan penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu untuk tahun mendatang dimulai dari selesainya analisis evaluasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2012/1433 H ini dengan menyampaikan penyempurnaan rekomendasi kepada Komisi V DPR RI.

Pada kesimpulan berikutnya, Yasti menyampaikan Komisi V DPR RI sepakat dengan Pemerintah untuk pem-

berian subsidi (PSO) angkutan khusus untuk sepeda motor dalam periode penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu pada tahun mendatang, dengan menggunakan moda pengangkutan Kereta Api, Kapal Laut dan angkutan darat.

Rapat kerja Komisi V DPR dengan mitra-mitra terkait yang berlangsung hingga sore hari membahas Evaluasi penanganan arus mudik Lebaran Terpadu.

Berdasarkan data dari Korlantas Polri angka kecelakaan yang terjadi pada mudik Lebaran Tahun 2012 sangat memprihatinkan. Jumlah angka kecelakaan ini meningkat dibandingkan tahun 2011.

Korban meninggal sampai dengan 27 Agustus 2012 sebesar 908 jiwa, meningkat 17 persen dari tahun 2011. Sedangkan total kecelakaan lalu lintas sebesar 7.870 kejadian dan melibatkan pengguna sepeda motor sebesar kurang lebih 70 persen atau sebesar 5.634 kejadian.

Hal ini tentunya perlu dicarikan solusinya agar angka kecelakaan di tahun-tahun mendatang dapat diminimalisir.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan

mengatakan, untuk keselamatan pemudik pengguna roda 2 (sepeda motor), pihaknya telah menghimbau masyarakat melalui media elektronik, cetak, leaflet dan brosur untuk tidak mudik dengan sepeda motor karena tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh.

Pihaknya juga telah mengeluarkan kebijakan, pengalihan pengangkutan sepeda motor dengan sarana lain secara gratis (kapal KRI Banda Aceh tujuan Jakarta-Semarang : 1.000 unit sepeda motor dan truk ke berbagai tujuan oleh Astra Honda Motor ; 1.100 unit sepeda motor.

Untuk sepeda motor ini, Pemerintah juga menyediakan jalur khusus sepeda motor pada ruas Karawang-Ciasem untuk mengurangi kepadatan arus di simpang Jomin arah Pantura.

Selain itu, juga disediakan tempat-tempat istirahat, sekaligus sebagai tempat pemeriksaan/bengkel motor. Namun yang tak kalah pentingnya, melakukan penegakan hukum terhadap pengguna sepeda motor yang lebih dari 2 (dua) orang di perbatasan Bekasi dan Tangerang.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan penyelenggaraan angkutan Lebaran di masa mendatang, dalam jangka pendek pihaknya mengusulkan menekan penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi mudik.

Guna menekan penggunaan sepeda motor ini, Pemerintah berencana menambah penyediaan sarana angkutan umum bus maupun KA yang nyaman dan aman untuk dapat menarik pengguna roda dua.

Pemerintah juga mendorong pengangkutan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) pihak swasta termasuk penambahan dukungan APBN dan APBD untuk menambah sarana mudik gratis yang dapat mengangkut sepeda motor menggunakan truk, KA, dan kapal laut. (tt)foto:wy/parle



Suasana rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan

DPR Raih Penghargaan Tertinggi Dalam Pengelolaan Anggaran

Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh mewakili DPR menerima Piagam Penghargaan Tertinggi dalam sistem pengelolaan anggaran dari Pemerintah untuk ketiga kalinya.

Piagam Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI Budiono di ruang Darmapala Departemen Keuangan Jakarta, Selasa (11/9) siang.

Menurut Sekjen DPR Nining Indra Saleh, piagam penghargaan diberikan berkat prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran DPR. Penilaian WTP sudah yang ke tiga kalinya secara berturut-turut, dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Piagam yang diterima Sekjen DPR tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga DPR Nur Iswanto.

Nining Indra Saleh menegaskan, prestasi WTP ini harus bisa dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang. WTP merupakan suatu penilaian pengelolaan sistem anggaran, dari perencanaan anggaran, kemudian pelaksanaan anggaran, pertanggungjawabannya, pengawasannya dan terakhir pelaporan.

WTP, sambung Sekjen DPR, bukanlah segala-galanya akan tetapi, ini merupakan tahapan yang penting bagaimana mengelola suatu anggaran ke depan akan lebih baik lagi. “Ke depan ada tantangan yang lebih berat lagi, karena tahapan demi tahan harus dilalui, baru bisa mendapat WTP,” tegasnya lagi.

Sementara Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR Tgk Faisal Amin mengapresiasi positif langkah sekjen dalam mempertahankan perolehan Hatrick WTP Sekjen DPR. “Apa yang telah diterima oleh Sekjen DPR itu adalah sangat baik, karena Sekjen mengurus DPR itu tidak mudah, apalagi yang diurus adalah orang-orang politisi yang ada di dalam lingkup Komisi maupun Badan Kelengkapan Dewan lainnya,” paparnya.

Faisal mengharapkan, masyarakat dapat melihat langsung dan mengun-

jungu fasilitas yang ada di DPR. “Sebaiknya masyarakat jangan hanya bisa mengkritik tapi seharusnya melihat langsung ke Senayan,” jelasnya.

Dia meminta, WTP ini dapat dipertahankan, bahkan kalau bisa lebih ditingkatkan. “Masalah ada kritikan dari luar silahkan saja, namun yang paling penting dari jajaran kesekretariatan dan Dewan sendiri melakukan koreksi internal kemudian memperbaiki kiner-

janya agar lebih baik lagi,” paparnya.

Anggota BURT Faisal Amin menegaskan DPR sudah sangat hati-hati dalam penggunaan anggaran, jika dibandingkan dengan lembaga atau Kementerian lainnya. “Namun alangkah baiknya kita tidak usah membanding-bandingkan dengan yang lain, yang jelas kita sudah melangkah lebih jauh dalam penghematan anggaran,” katanya. (Spy), foto : wahyu/parle.



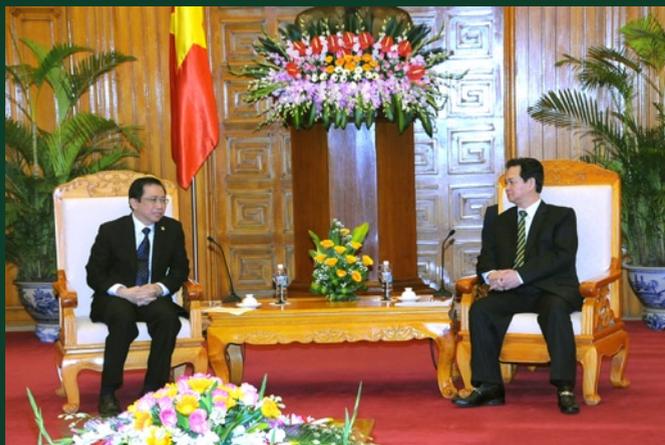
Sekjen DPR Nining Indra Saleh (kanan) saat menyerahkan piagam penghargaan WTP kepada Pimpinan BURT DPR RI



Sekjen DPR Nining Indra Saleh (tengah)



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima kunjungan kehormatan Parlemen China HE.MR. Huang Xian Zhong di Gedung Nusantara III DPR Kamis (13/9)Foto: Iwan Armanias/parle



Delegasi DPR RI yang diwakili oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie diterima Perdana Menteri Vietnam, H.E. Nguyen Tan Dung di Kantor Perdana Menteri, di Hanoi, Vietnam, Rabu (05/09), Foto: Denus/parle



Ketua DPR Marzuki Alie selaku Presiden AIPA memimpin Delegasi DPR ke Kerajaan Thailand yang diterima langsung oleh Ketua Parlemen Thailand, Somsak Kiatsuranon, Kamis (06/09), Foto: Denus/parle



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyerahkan palu sidang kepada Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatogana dalam acara penetapan pimpinan Komisi VII di Gedung Nusantara I DPR. Selasa (4/9)Foto: Iwan Armanias/parle

